Jurnal Manajemen Ekonomi Terapan

https://ojs.inlic.org/index.php/jmet, E-ISSN: 2986-8327

OPTIMALISASI KOORDINASI LINTAS SEKTOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN SEMBAKUNG

Irmawati[1], Mujahid [2], Rosnani Daga[3]

trantibsbkg@gmail.com [1], mujahid@unifa.ac.id [2], rosnaini.daga@unifa.ac.id [3]

[1 23]Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Fajar

**Correspondent Email:* trantibsbkg@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan manajemen koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antar stakeholder dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, aparat keamanan, serta unsur masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Camat Sembakung, Kapolsek Sembakung, Danramil Sembakung, Kepala Puskesmas, Kepala UPTD Pendidikan, tokoh agama, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang aktif antar stakeholder, kesadaran akan pentingnya koordinasi, keterlibatan stakeholder sesuai kompetensinya, adanya komitmen bersama, serta pelaksanaan koordinasi secara berkelanjutan. Manajemen koordinasi lintas sektor juga telah dilaksanakan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kondisi geografis wilayah yang luas, keterbatasan jaringan komunikasi, keterbatasan sarana pendukung, dan ego sektoral antarinstansi. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas koordinasi lintas sektor tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme koordinasi formal, tetapi juga oleh modal sosial masyarakat berupa budaya kekeluargaan, musyawarah, serta peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas wilayah.

Kata Kunci: Koordinasi lintas sektor, Ketenteraman dan ketertiban umum, Manajemen koordinasi, Modal sosial, Stakeholder.

Abstrak

This study aims to analyze the implementation of cross-sectoral coordination and the management of cross-sectoral coordination in maintaining public peace and order in Sembakung Subdistrict. The study is motivated by the importance of synergy among stakeholders in maintaining public peace and order, which involves various government agencies, security forces, and members of the community.

This study employs a qualitative approach using a descriptive method. The research informants include the Sembakung Subdistrict Head, the Sembakung Police Chief, the Sembakung Military District Commander, the Head of the Community Health Center, the Head of the Education Technical Implementation Unit, religious leaders, and traditional leaders. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed using the interactive analysis model developed by Miles & Huberman (2014), which includes data condensation, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that cross-sectoral coordination in maintaining public peace and order in Sembakung Subdistrict has been carried out fairly well. This is evidenced by active communication among stakeholders, an awareness of the importance of coordination, stakeholder involvement commensurate with their respective competencies, a shared commitment, and the ongoing implementation of coordination. Cross-sectoral coordination management has also been carried out through the functions of planning, organizing, mobilizing, and supervising. However, its implementation still faces challenges in the form of the vast geographical expanse of the region, limited communication networks, insufficient supporting infrastructure, and inter-agency sectoral egoism. This study found that the effectiveness of cross-sectoral coordination is influenced not only by formal coordination mechanisms but also by the community's social capital, such as a culture of kinship, deliberation, and the roles of religious and traditional leaders in maintaining regional stability.

Keywords: Cross-sectoral coordination, Public peace and order, Coordination management, Social capital, Stakeholders.

1. Pendahuluan

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Stabilitas sosial menjadi fondasi bagi keberlangsungan pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis. Tanpa kondisi yang aman dan tertib, berbagai program pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan.

Dalam kerangka desentralisasi pemerintahan di Indonesia, urusan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tataran implementasi, pelaksanaan fungsi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi melibatkan berbagai aktor lintas sektor, seperti pemerintah

kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, TNI, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Kompleksitas aktor yang terlibat menuntut adanya koordinasi yang efektif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun fragmentasi kebijakan.

Secara teoretis, koordinasi dalam organisasi publik dipahami sebagai proses penyelarasan tindakan antar unit atau antar organisasi untuk mencapai tujuan Bersama Thomas, R., Daga, R., & Samad, A. (2024). menegaskan bahwa lemahnya koordinasi dalam sektor publik dapat menimbulkan *coordination failure* yang berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan. Lebih lanjut, pendekatan *collaborative governance* menjelaskan bahwa penanganan persoalan publik yang kompleks memerlukan interaksi yang intensif, pembagian peran yang jelas, serta komitmen bersama antar aktor (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi lintas sektor yang terbangun.

Meskipun secara normatif kerangka koordinasi telah diatur, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Hambatan yang sering muncul antara lain ketidakjelasan pembagian tugas, keterbatasan komunikasi antar instansi, serta belum terintegrasinya sistem informasi penanganan kasus. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan ketertiban umum cenderung bersifat sektoral dan reaktif, bukan preventif dan sistematis.

Fenomena tersebut juga tercermin di Kecamatan Sembakung. Berdasarkan data awal yang diperoleh, terdapat beberapa kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi dalam periode terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung masih memerlukan perhatian melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif antarinstansi. sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1 Kasus Ketertiban dan Ketenteraman Umum Kecamatan Sembakung Tahun 2025

No.	Uraian Kejadian/Kasus Ketertiban dan Ketenteraman Umum	Jumlah Kejadian	Keterangan
1.	Peredaran Narkoba	5 Kasus	- Satu kasus yang diselesaikan Melalui Jalur Hukum / Kepolisian - Kasus Peredaran Yang Lain Banyak Tidak Bisa Diungkap Oleh Kepolisian Karena tidak Menemukan Barang Bukti.
2.	Pencurian Sarang Burung Walet	2 Kasus	Tidak Tercatat Di Kepolisian Karena Di Selesaikan Secara Kekeluargaan.
3.	Peredaran Miras	1 Kasus	Terungkap pada saat razia dalam rangka pengamanan natal dan tahun baru

Sumber : Data Kecamatan Sembakung, Diolah Tahun 2026

Data tersebut memperlihatkan adanya kasus peredaran narkoba, pencurian sarang burung walet, dan peredaran minuman keras. Meskipun jumlah kasus yang tercatat relatif terbatas, terdapat indikasi persoalan koordinasi dalam penanganannya. Salah satu kasus peredaran narkoba tidak sepenuhnya terungkap karena tidak ditemukannya barang bukti. Kasus pencurian sarang burung walet bahkan tidak tercatat di kepolisian karena diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, pengungkapan peredaran minuman keras dilakukan melalui razia musiman pada momentum hari besar keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penanganan masih cenderung reaktif, belum terintegrasi

secara sistematis, dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data formal dan realitas sosial di lapangan.

Penyelesaian kasus secara informal memang mencerminkan kuatnya nilai sosial dan mekanisme musyawarah di masyarakat. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan data antar instansi serta menyulitkan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Selain itu, pola penanganan yang bersifat insidental menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, baik dalam aspek komunikasi, pembagian peran, maupun sistem pelaporan bersama. Penguatan mekanisme pengawasan dan pelaporan bersama ini sejalan dengan temuan Berg dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa peran konsultatif lembaga pengawas menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di tingkat daerah.

Kajian mengenai koordinasi pemerintahan daerah lebih banyak difokuskan pada level kabupaten/kota atau pada institusi tertentu seperti Satpol PP dan Kepolisian. Penelitian yang secara spesifik mengkaji koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada level kecamatan masih relatif terbatas. Padahal, kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat dan memiliki peran strategis dalam deteksi dini serta penanganan awal gangguan ketertiban. Keterbatasan kajian pada level ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme koordinasi yang berlangsung, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya penguatan koordinasi yang dapat dilakukan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen strategi organisasi publik, khususnya dalam konteks koordinasi dan tata kelola kolaboratif di tingkat kecamatan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung?
2. Bagaimana manajemen koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung.
2. Untuk menganalisis manajemen koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung.

.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung. Fokus penelitian ini bukan pada pengukuran

angka atau pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada pemahaman terhadap dinamika interaksi antar aktor, pola komunikasi, pembagian peran, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi dalam konteks pemerintahan lokal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus karena penelitian ini berfokus pada satu unit analisis tertentu, yaitu Kecamatan Sembakung, yang dikaji secara intensif dan kontekstual. Agusmiati, A., Hamzah, N., & Daga, R. (2026) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif dinamika koordinasi lintas sektor yang terjadi dalam suatu sistem pemerintahan lokal yang memiliki karakteristik tersendiri. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian ini tidak hanya menggambarkan bagaimana koordinasi dilaksanakan, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Sembakung merupakan unit pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lokal. Sebagai perangkat daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat, kecamatan berfungsi sebagai koordinator berbagai unsur pemerintahan dan aparat penegak ketertiban dalam menangani berbagai persoalan sosial yang terjadi di wilayahnya.

menganalisis pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama bulan Juni 2026, yang meliputi kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang telah ditetapkan. Pemilihan waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian serta ketersediaan informan sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan secara optimal.

B. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi peneliti dengan informan di lapangan. Menurut Sugiyono (2019), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, seperti pihak Kecamatan Sembakung, aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, serta pihak lain yang relevan. Selain wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap proses koordinasi dan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau sumber tertulis yang mendukung penelitian. Moleong (2017) menjelaskan bahwa data sekunder dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen resmi, arsip, laporan,.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung..

Berdasarkan pendapat tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, seperti pihak kecamatan, Satpol PP, Kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observas.

D. Informan Penelitian

Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Informan Penelitian

Nama Informan	Jabatan Informan
Santi Widayat, S.H.	Camat Sembakung
Said Muchdar, Amd, Kep.	Kepala UPTD Puskesmas Sembakung
AKP. Supriadi	Kapolsek Sembakung
Kapten Inf. Bambang Subandi	Danramil Sembakung
Plt. Musdi, S.I.P.	Kepala UPTD Disdik Sembakung
Abu Bakar, S.I.P.	Tokoh Agama
Kurnain	Tokoh Adat

Sumber : Data Primer (2026)

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2014). Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan analisis secara mendalam terhadap data yang diperoleh di lapangan. Menurut Miles & Huberman (2014), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan.

Menurut Miles & Huberman (2014), analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
   Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola dari data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2019).
2. *Data Display* (Penyajian Data)
   Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, atau tabel yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar kategori data (Miles & Huberman, 2014).
3. *Consulsion Drawing / Verifikation*
   Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan makna data yang telah direduksi dan disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Miles & Huberman, 2014).

F. Validitas Temuan

Pengecekan validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kepercayaan, konsistensi, dan keakuratan yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan validitas data sebagai berikut.

1. Triangulasi
   a. Triangulasi Sumber
   b. Triangulasi Teknik
2. Member check
   Member check dilakukan dengan meminta informan penelitian untuk memeriksa kembali hasil wawancara atau temuan sementara yang telah diperoleh peneliti.

1. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian.

1. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sembakung

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilaksanakan melalui komunikasi lintas kelembagaan, pembagian tugas, pengambilan keputusan bersama, patroli gabungan, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial. Dalam penelitian ini, pelaksanaan koordinasi lintas sektor dianalisis menggunakan indikator koordinasi menurut Handayaningrat (2002) yang terdiri atas komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan.

a. Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Camat Sembakung menjelaskan bahwa komunikasi lintas sektor dilakukan secara aktif melalui media komunikasi digital guna mempercepat respons terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemanfaatan media komunikasi digital tersebut dinilai mampu mempercepat penyampaian informasi dan memudahkan koordinasi antarpemangku kepentingan, terutama ketika terjadi situasi yang memerlukan penanganan secara segera.

"Kalau komunikasi ya alhamdulillah sejauh ini cukup lancar. Jadi ada grup WA trantibum yang aktif 24 jam. Kalau ada laporan masyarakat atau potensi gangguan keamanan biasanya langsung disampaikan di grup supaya cepat ditindaklanjuti." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Hal serupa juga disampaikan oleh Kapolsek Sembakung yang menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan melalui berbagai saluran agar informasi dapat diterima secara cepat oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberagaman media komunikasi tersebut mempermudah penyebaran informasi sekaligus mempercepat koordinasi antarinstansi dalam merespons setiap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

"Kalau komunikasi ya kita menggunakan beberapa cara. Ada grup WhatsApp forkopimcam, telepon langsung, surat resmi, sama koordinasi tatap muka." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Selain itu, Danramil Sembakung juga menyampaikan bahwa komunikasi lintas sektor sangat membantu dalam pencegahan konflik sosial di masyarakat.

"Kalau ada informasi dari masyarakat atau aparat desa terkait potensi gangguan keamanan, biasanya langsung disampaikan supaya cepat ditindaklanjuti." ***(Wawancara dengan Kapten. Inf. Bambang Subandi pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Selain komunikasi antarinstansi pemerintah dan aparat keamanan, komunikasi juga dibangun dengan melibatkan unsur masyarakat. Tokoh agama menjelaskan bahwa pemerintah dan aparat keamanan cukup terbuka dalam membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam komunikasi lintas sektor tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung.

"Kalau komunikasi selama ini cukup baik. Biasanya kami dilibatkan dalam rapat koordinasi, kegiatan sosial, sama kalau ada masalah di masyarakat kami juga sering diajak berdiskusi oleh pihak kecamatan atau aparat keamanan." ***(Wawancara dengan Abu Bakar, S.IP. pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas komunikasi masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa desa. Kondisi tersebut menyebabkan penyampaian informasi tidak selalu dapat dilakukan secara cepat, terutama pada wilayah yang sulit dijangkau atau ketika terjadi gangguan jaringan telekomunikasi. Akibatnya, koordinasi dan penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada kondisi tertentu dapat mengalami keterlambatan. Kepala Puskesmas menyampaikan:

"Kedua wilayah Kecamatan Sembakung ini cukup luas dan akses ke beberapa desa masih sulit. Selain itu jaringan komunikasi kadang kurang bagus." ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Temuan penelitian ini juga mendukung pendapat Malone dan Crowston yang menyatakan bahwa koordinasi merupakan proses pengelolaan ketergantungan antaraktivitas organisasi melalui pertukaran informasi yang efektif. Praktik komunikasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung menunjukkan bahwa pertukaran informasi menjadi kebutuhan utama dalam menyelaraskan tindakan antarinstansi, terutama dalam merespons berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, komunikasi menjadi

instrumen penting dalam menjaga keterpaduan pelaksanaan tugas di antara para pemangku kepentingan.

b. Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian, seluruh stakeholder memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor secara berkelanjutan. Kesadaran tersebut tercermin dari adanya komitmen masing-masing instansi untuk saling mendukung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Sembakung. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh sinergi dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Camat Sembakung menyampaikan:

"Menjaga ketenteraman dan ketertiban umum itu tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Kecamatan tidak bisa kerja sendiri, polisi juga tidak bisa sendiri, TNI juga begitu." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman bersama bahwa keamanan wilayah merupakan tanggung jawab kolektif seluruh stakeholder. Kesamaan persepsi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sinergi dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Kesadaran yang sama juga disampaikan oleh Kapolsek Sembakung sebagaimana hasil wawancara berikut:

"Keamanan wilayah itu bukan cuma tanggung jawab polisi saja. Harus ada kerja sama dengan kecamatan, TNI, Satpol PP, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026.)***

Selain unsur pemerintah dan aparat keamanan, kesadaran akan pentingnya koordinasi juga terlihat pada tokoh agama dan tokoh adat yang aktif mendukung penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Keterlibatan unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat melalui tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitarnya. Tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:

"Pemerintah, polisi, TNI, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat semua harus saling bantu." ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026.)***

Sementara itu, tokoh agama menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam menjaga stabilitas masyarakat.

"Kadang masyarakat ini butuh didatangi, diajak bicara, bukan cuma dikasih aturan saja." ***(Wawancara dengan Abu Bakar, S.IP. pada Selasa, 19 Mei 2026.)***

Temuan tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yaitu keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam menyelesaikan persoalan publik melalui proses kolaboratif. Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan unsur masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan keamanan menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah melibatkan berbagai aktor sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

c. Kompetensi Partisipan dalam Koordinasi

Pelaksanaan koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung juga ditunjukkan melalui keterlibatan berbagai stakeholder sesuai dengan kapasitas, tugas, dan kewenangan masing-masing. Setiap stakeholder menjalankan perannya secara saling melengkapi sehingga pelaksanaan koordinasi tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Camat Sembakung sebagai berikut:

"Kalau di Kecamatan Sembakung ini ada dua kubu sebenarnya. Ada kubu kecamatan sama kubu desa." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pada tingkat kecamatan, koordinasi melibatkan camat, sekcam, kasi trantib, Polsek, Koramil, dan staf kecamatan. Sedangkan pada tingkat desa melibatkan kepala desa, linmas, RT, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Kapolsek Sembakung menjelaskan:

"Yang terlibat biasanya pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, Satpol PP, pemerintah desa, Linmas, tokoh agama, tokoh adat, sama masyarakat sekitar." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Selain aparat keamanan, sektor kesehatan dan sektor pendidikan juga memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga kondisi yang aman dan kondusif memerlukan keterlibatan berbagai sektor pembangunan. Kepala Puskesmas menjelaskan sebagai berikut:

"Puskesmas ini bukan cuma urusan pelayanan kesehatan saja, tapi juga ikut dalam koordinasi lintas sektor terkait ketenteraman dan ketertiban umum." ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sembakung menyampaikan:

"Dunia pendidikan juga punya tanggung jawab membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak supaya tidak terlibat dalam tindakan yang mengganggu ketertiban umum." ***(Wawancara dengan Musdi, S.IP pada Senin, 18 Mei 2026)***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah melibatkan berbagai sektor, meliputi aspek keamanan, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan keagamaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan koordinasi tidak lagi hanya bertumpu pada mekanisme birokrasi formal, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif berbagai sektor dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

d. Kesepakatan dan Komitmen dalam Koordinasi Lintas Sektor.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilaksanakan melalui pembagian tugas yang cukup jelas antarinstansi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah kecamatan bertindak sebagai koordinator wilayah, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum, Koramil mendukung pengamanan wilayah, sedangkan tokoh masyarakat berperan dalam pendekatan sosial kemasyarakatan. Camat Sembakung menjelaskan:

"Pembagian tugasnya sudah ada sesuai tupoksi masing-masing. Kecamatan sebagai koordinator forkopimcam dan mediator kalau ada konflik. Kapolsek fokus di penegakan hukum dan kamtibmas. Danramil lebih ke pengamanan wilayah dan deteksi dini konflik. Satpol PP penegakan perda dan penertiban." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah memahami fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pembagian tugas yang jelas menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarinstansi sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Kapolsek Sembakung yang menyampaikan sebagai berikut:

"Kalau pembagian tugas itu sudah sesuai tupoksi masing-masing. Polisi fokus di penegakan hukum dan pengamanan. Koramil membantu pengamanan wilayah dan pendekatan persuasif. Kecamatan biasanya jadi koordinator dan mediator." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Senada dengan hal tersebut, Danramil Sembakung menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas dan kesepakatan yang telah disepakati bersama oleh setiap instansi. Hal tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang sama mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Danramil Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

"Kalau pembagian tugas itu sudah sesuai tugas masing-masing. Koramil fokus di pengamanan wilayah sama pendekatan persuasif ke masyarakat. Polsek lebih ke penegakan hukum dan keamanan. Kecamatan sebagai koordinator dan mediator kalau ada konflik." ***(Wawancara dengan Kapten. Inf. Bambang Subandi pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Selain itu, komitmen koordinasi juga terlihat dari keterlibatan aktif unsur masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ketenteraman lingkungan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat sesuai dengan peran sosial yang dimilikinya. Tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:

"Pemerintah, polisi, TNI, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat semua harus saling bantu." ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Handayaningrat (2002) yang menyatakan bahwa kesepakatan dan komitmen merupakan unsur penting dalam koordinasi karena menentukan tingkat kepatuhan serta konsistensi pelaksanaan keputusan bersama. Komitmen yang ditunjukkan oleh para stakeholder di Kecamatan Sembakung memperlihatkan bahwa keberhasilan koordinasi tidak hanya ditentukan oleh adanya struktur organisasi, tetapi juga oleh kesediaan setiap pihak untuk melaksanakan hasil kesepakatan secara konsisten demi tercapainya tujuan bersama.

e. Kontinuitas Perencanaan dalam Koordinasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilakukan secara rutin melalui forum koordinasi lintas sektor, rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), patroli bersama, serta evaluasi kegiatan keamanan wilayah. Pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut menunjukkan adanya komitmen para stakeholder untuk menjaga kesinambungan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Camat Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

"Nah iya, koordinasi itu rutin dilakukan. Biasanya ada rapat rutin satu bulan sekali atau kadang tiga bulan sekali tergantung kondisi wilayah." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung tidak hanya dilaksanakan ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas wilayah. Pelaksanaan koordinasi secara berkelanjutan tersebut mencerminkan adanya komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Kapolsek Sembakung yang menyampaikan sebagai berikut:

"Iya rutin dilakukan. Biasanya ada rapat koordinasi bulanan forkopimcam, patroli bersama, apel gabungan, sama pengamanan kegiatan masyarakat." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Sementara itu, Danramil Sembakung menjelaskan:

"Biasanya ada rapat koordinasi bulanan, patroli bersama, apel gabungan, sama pengamanan kegiatan masyarakat." ***(Wawancara dengan Kapten. Inf. Bambang Subandi pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Selain pelaksanaan rapat rutin, kontinuitas koordinasi juga dilakukan melalui evaluasi kegiatan dan monitoring kondisi keamanan wilayah. Kapolsek Sembakung menyampaikan:

"Biasanya dilakukan evaluasi setelah kegiatan atau dalam rapat koordinasi rutin. Kita lihat situasi keamanan, laporan masyarakat, respon aparat, sama kendala yang muncul di lapangan." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Kepala Puskesmas juga menjelaskan:

"Biasanya setelah kegiatan atau rapat lintas sektor ada evaluasi bersama. Kita lihat kendala di lapangan, respon masing-masing instansi, sama apa yang perlu diperbaiki ke depan." ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kontinuitas koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, terutama kondisi geografis wilayah yang luas, keterbatasan akses transportasi menuju desa-desa terpencil, serta keterbatasan jaringan komunikasi. Kondisi tersebut memengaruhi kelancaran pelaksanaan koordinasi, khususnya

pada wilayah yang memiliki aksesibilitas dan sarana komunikasi yang terbatas. Tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:

> *"Wilayah di sini luas, ada desa yang jauh jadi informasi kadang terlambat sampai."* ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Handayaningrat (2002) yang menyatakan bahwa kontinuitas perencanaan diperlukan agar koordinasi tidak bersifat insidental, melainkan berlangsung secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut kegiatan organisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang dilakukan secara rutin telah mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara lebih terarah dan berkesinambungan. Dengan demikian, kontinuitas perencanaan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung.

2. Manajemen Koordinasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sembakung

Dalam penelitian ini, manajemen koordinasi lintas sektor dianalisis menggunakan teori fungsi manajemen Terry (2010) yang meliputi planning, organizing, actuating, dan controlling. Keempat fungsi tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dilaksanakan dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan manajemen koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor, pemetaan wilayah rawan gangguan keamanan, penyusunan jadwal patroli, serta identifikasi potensi konflik sosial di masyarakat. Camat Sembakung menjelaskan:

> *"Pertama itu perencanaan, jadi kami memetakan dulu titik-titik rawan di wilayah. Dari situ nanti dibuat peta rawan sama jadwal patroli."* ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah melakukan identifikasi wilayah rawan sebagai bagian dari upaya preventif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pemetaan wilayah rawan dilakukan agar stakeholder dapat menentukan langkah pengamanan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain itu, **Camat Sembakung** juga menjelaskan bahwa proses perencanaan dilakukan melalui rapat koordinasi rutin antarinstansi.

> *"Kalau perencanaan biasanya dimulai dari rapat koordinasi bulanan. Kita bahas titik rawan, evaluasi kejadian sebelumnya, lalu bagi jadwal patroli dan pengamanan."* ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Hal serupa juga disampaikan oleh **Danramil Sembakung:**

> *"Biasanya sebelum kegiatan besar atau ada potensi gangguan keamanan kita lakukan rapat koordinasi dulu. Di situ dibahas pembagian tugas, titik rawan, jumlah personel, sama langkah antisipasi."* ***(Wawancara dengan Kapten. Inf. Bambang Subandi pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait. Perencanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kecamatan, tetapi juga melibatkan aparat keamanan dan stakeholder lainnya sehingga tercipta penyamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Selain sektor keamanan, sektor pendidikan dan kesehatan juga terlibat dalam proses perencanaan kegiatan preventif di masyarakat. Kepala UPTD Pendidikan menjelaskan:

> *"Biasanya sebelum kegiatan ada rapat koordinasi dulu. Jadi dibahas tujuan kegiatan, siapa yang terlibat, pembagian tugas, sama waktu pelaksanaan."* ***(Wawancara dengan Musdi, S.IP pada Senin, 18 Mei 2026)***

Sementara itu, Kepala Puskesmas menyampaikan:

"Biasanya sebelum kegiatan ada rapat koordinasi dulu. Misalnya pengamanan kegiatan masyarakat atau penanganan kasus sosial tertentu." ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung tidak hanya difokuskan pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang telah terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya preventif melalui pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan penguatan peran sosial masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan telah diarahkan untuk mengantisipasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar. Dengan demikian, proses perencanaan menjadi dasar dalam membangun koordinasi lintas sektor yang lebih terarah dan berkelanjutan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam manajemen koordinasi lintas sektor dilakukan melalui pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab antar pemangku kepentingan sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing. Pembagian peran tersebut menjadi dasar dalam membangun sinergi antarinstansi sehingga setiap pihak memahami tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan koordinasi dapat berlangsung secara lebih terarah, efektif, dan meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Camat Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

"Pembagian tugasnya sudah ada sesuai tupoksi masing-masing. Kecamatan sebagai koordinator forkopimcam dan mediator kalau ada konflik. Kapolsek fokus di penegakan hukum dan kamtibmas. Danramil lebih ke pengamanan wilayah dan deteksi dini konflik." ***(Wawancara dengan Santi Widayat pada Senin, 18 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi lintas sektor telah memiliki pembagian peran yang cukup jelas antarinstansi. Pemerintah kecamatan bertindak sebagai koordinator wilayah, sedangkan aparat keamanan menjalankan fungsi pengamanan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya masing-masing. Kapolsek Sembakung juga menjelaskan:

"Kalau pembagian tugas itu sudah sesuai tupoksi masing-masing. Polisi fokus di penegakan hukum dan pengamanan. Koramil membantu pengamanan wilayah dan pendekatan persuasif." ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Sementara itu, Danramil Sembakung menyampaikan:

"Koramil fokus di pengamanan wilayah sama pendekatan persuasif ke masyarakat." ***(Wawancara dengan Kapten. Inf. Bambang Subandi pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Selain aparat keamanan, pengorganisasian koordinasi juga melibatkan unsur masyarakat dan berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembagian tugas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup upaya pembinaan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengorganisasian koordinasi telah dilaksanakan secara lintas sektor dengan memanfaatkan peran setiap pemangku kepentingan dalam mendukung terciptanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Kepala Puskesmas menjelaskan sebagai berikut:

"Puskesmas fokus dari sisi kesehatan. Polisi penegakan hukum, kecamatan koordinasi dan mediasi." ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Tokoh adat juga menjelaskan bahwa masyarakat di Kecamatan Sembakung masih menjunjung tinggi penyelesaian konflik melalui pendekatan kekeluargaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki peran strategis dalam mendukung pengorganisasian koordinasi lintas sektor, khususnya sebagai penghubung antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Keterlibatan tokoh adat memperkuat pelaksanaan koordinasi karena penyelesaian berbagai permasalahan di

masyarakat tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga memanfaatkan nilai-nilai sosial dan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:

> *"Kalau ada masalah antar warga biasanya sebelum dibawa jauh, masyarakat datang dulu ke tokoh adat."* ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori Terry (2010) yang menyatakan bahwa organizing merupakan proses pengelompokan aktivitas, pembagian tugas, serta penentuan hubungan kerja agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, fungsi organizing telah diwujudkan melalui pembagian kewenangan dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mengurangi ego sektoral. Dengan demikian, pengorganisasian menjadi salah satu faktor penting dalam membangun koordinasi lintas sektor yang efektif dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan dalam manajemen koordinasi lintas sektor diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan bersama, seperti patroli gabungan, apel gabungan, pengamanan kegiatan masyarakat, penyuluhan sosial, pembinaan masyarakat, serta penyelesaian konflik sosial secara kolaboratif. Melalui kegiatan bersama tersebut, sinergi antarinstansi dapat terbangun sehingga upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih mengedepankan pendekatan preventif serta penyelesaian permasalahan secara terpadu. Kapolsek Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

> *"Patroli gabungan biasanya dilakukan pada jam-jam rawan atau saat ada kegiatan besar masyarakat."* ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Pelaksanaan patroli gabungan tersebut melibatkan Polsek, Koramil, Satpol PP, Linmas, serta pemerintah kecamatan dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa penggerakan berbagai pemangku kepentingan telah diarahkan pada upaya preventif dengan melibatkan tokoh agama sebagai mitra strategis dalam membina masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di Kecamatan Sembakung. Tokoh agama menjelaskan sebagai berikut:

> *"Kadang habis salat atau pengajian saya selipkan pembahasan tentang pentingnya menjaga lingkungan, menghormati orang tua, jangan bikin keributan."* ***(Wawancara dengan Abu Bakar, S.IP. pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Sementara itu, tokoh adat berperan aktif dalam penyelesaian konflik masyarakat melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan. Peran tersebut menunjukkan bahwa penggerakan koordinasi lintas sektor tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat yang memiliki pengaruh sosial dalam menjaga keharmonisan lingkungan. Keterlibatan tokoh adat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan koordinasi karena mampu mendorong penyelesaian permasalahan secara damai, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan. Tokoh adat menjelaskan sebagai berikut:

> *"Kalau ada masalah antar warga biasanya sebelum dibawa jauh, masyarakat datang dulu ke tokoh adat atau tokoh masyarakat."* ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Selain itu, sektor pendidikan juga memiliki peran dalam penggerakan koordinasi melalui pembinaan pelajar dan penguatan pendidikan karakter. Keterlibatan sektor pendidikan menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi lintas sektor tidak hanya berorientasi pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi juga diarahkan pada upaya preventif melalui pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai kedisiplinan, serta peningkatan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Peran tersebut memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan menjadi salah satu mitra strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sejak usia dini guna menciptakan

kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

> *"Biasanya kami bekerja sama dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan pelajar, penyuluhan bahaya narkoba, kegiatan keagamaan, sama pengawasan lingkungan sekolah."* ***(Wawancara dengan Musdi, S.IP pada Senin, 18 Mei 2026)***

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan teori Terry (2010) yang menyatakan bahwa actuating merupakan proses menggerakkan seluruh sumber daya organisasi agar mampu bekerja secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, fungsi actuating tidak hanya tercermin dalam pelaksanaan kegiatan bersama, tetapi juga dalam kemampuan menggerakkan partisipasi berbagai unsur masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum secara efektif, preventif, dan berkelanjutan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan dalam manajemen koordinasi lintas sektor dilakukan melalui monitoring kondisi keamanan wilayah, evaluasi kegiatan koordinasi, laporan masyarakat, serta evaluasi hasil patroli dan pengamanan di lapangan. Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, pengawasan juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sehingga dapat segera dilakukan tindak lanjut dan perbaikan secara bersama. Kapolsek Sembakung menjelaskan sebagai berikut:

> *"Biasanya dilakukan evaluasi setelah kegiatan atau dalam rapat koordinasi rutin. Kita lihat situasi keamanan, laporan masyarakat, respon aparat, sama kendala yang muncul di lapangan."* ***(Wawancara dengan AKP. Supriadi pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor. Melalui proses evaluasi tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas koordinasi pada kegiatan berikutnya.. Kepala Puskesmas juga menyampaikan sebagai berikut:

> *"Biasanya setelah kegiatan atau rapat lintas sektor ada evaluasi bersama. Kita lihat kendala di lapangan, respon masing-masing instansi, sama apa yang perlu diperbaiki ke depan."* ***(Wawancara dengan Said Muchtar, Amd. Kep pada Senin, 25 Mei 2026)***

Selain evaluasi formal, pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan kondisi sosial masyarakat oleh tokoh agama, tokoh adat, dan aparat desa. Keterlibatan unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dalam koordinasi lintas sektor tidak hanya mengandalkan mekanisme birokrasi, tetapi juga didukung oleh pengawasan sosial yang berlangsung secara langsung di lingkungan masyarakat. Melalui pemantauan tersebut, berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dideteksi lebih awal sehingga para pemangku kepentingan dapat segera melakukan langkah-langkah koordinasi dan penanganan secara preventif. Tokoh agama menjelaskan sebagai berikut:

> *"Kadang masyarakat ini butuh didatangi, diajak bicara, bukan cuma dikasih aturan saja."* ***(Wawancara dengan Abu Bakar, S.IP. pada Selasa, 19 Mei 2026)***

Sementara itu, tokoh adat menyampaikan:

> *"Wilayah di sini luas, ada desa yang jauh jadi informasi kadang terlambat sampai."* ***(Wawancara dengan Kurnain pada Selasa, 26 Mei 2026)***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah berjalan melalui mekanisme monitoring, evaluasi, serta pengawasan sosial yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain kondisi geografis wilayah yang luas, keterbatasan jaringan komunikasi, keterlambatan penyampaian informasi dari masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, khususnya pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring dan tindak lanjut terhadap beberapa potensi

gangguan ketenteraman dan ketertiban umum belum dapat dilaksanakan secara optimal di seluruh wilayah Kecamatan Sembakung.

A. Pembahasan

1. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sembakung

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah dilaksanakan melalui keterlibatan berbagai stakeholder pemerintah maupun unsur masyarakat. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi lintas kelembagaan, rapat koordinasi rutin, patroli gabungan, pembagian tugas antarinstansi, serta pelibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Praktik koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung dilaksanakan secara kolaboratif dengan memanfaatkan peran dan fungsi masing-masing stakeholder sesuai kewenangannya.

Pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penelitian ini dianalisis menggunakan indikator koordinasi menurut Handayaningrat (2002) yang meliputi komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Kelima indikator tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana koordinasi lintas sektor telah berjalan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung. Berdasarkan hasil analisis terhadap setiap indikator, pelaksanaan koordinasi lintas sektor telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan upaya perbaikan guna meningkatkan efektivitas koordinasi di masa mendatang.

a. Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung pelaksanaan koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung. Komunikasi dilakukan melalui forum formal seperti rapat koordinasi dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta komunikasi informal melalui telepon langsung dan grup WhatsApp lintas sektor. Variasi saluran komunikasi tersebut menunjukkan bahwa para stakeholder memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk mempercepat pertukaran informasi dan mendukung efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Keberadaan grup WhatsApp Trantibum yang aktif digunakan oleh pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya menunjukkan adanya adaptasi koordinasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Penggunaan media komunikasi digital memungkinkan pertukaran informasi berlangsung lebih cepat sehingga potensi gangguan keamanan dapat segera ditindaklanjuti. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi telah menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi lintas sektor, khususnya pada wilayah yang memiliki karakteristik geografis cukup luas seperti Kecamatan Sembakung.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pola komunikasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah berkembang menjadi komunikasi yang responsif dan fleksibel. Komunikasi tidak lagi hanya bergantung pada mekanisme birokrasi formal, tetapi juga memanfaatkan pendekatan komunikasi informal yang lebih cepat dalam merespons kondisi di lapangan. Pola komunikasi tersebut memungkinkan proses koordinasi berlangsung secara lebih dinamis tanpa mengurangi efektivitas penyampaian informasi antarlembaga.

Selain komunikasi antarinstansi pemerintah, komunikasi juga dibangun dengan melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam forum koordinasi menunjukkan bahwa komunikasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah memadukan pendekatan kelembagaan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan. Pelibatan unsur masyarakat tersebut memperkuat penyampaian informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Namun demikian, efektivitas komunikasi masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan keterbatasan jaringan komunikasi di beberapa desa terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan penyampaian informasi tertentu mengalami keterlambatan, terutama pada wilayah yang akses transportasi dan komunikasinya masih terbatas. Akibatnya, koordinasi dan respons terhadap beberapa gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada situasi tertentu belum dapat dilakukan secara optimal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zalvadan & Yuza (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena menunjukkan bahwa pemanfaatan komunikasi digital melalui grup koordinasi lintas sektor menjadi strategi yang efektif untuk mempercepat pertukaran informasi dan respons terhadap gangguan keamanan di wilayah kecamatan perbatasan. Kebaruan tersebut memperkaya kajian mengenai koordinasi lintas sektor dengan menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi mampu meningkatkan efektivitas koordinasi pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses geografis.

b. Kesadaran Akan Pentingnya Koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder memiliki kesadaran bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat dilakukan secara individual maupun sektoral, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut menjadi landasan bagi setiap instansi dan unsur masyarakat untuk saling mendukung sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya koordinasi, pelaksanaan berbagai kegiatan dapat dilakukan secara lebih terpadu dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kesadaran tersebut tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, Polsek, Koramil, sektor kesehatan, sektor pendidikan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh adat dalam menjaga stabilitas wilayah. Setiap stakeholder menjalankan peran sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya sehingga tercipta sinergi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah menjadi bagian dari mekanisme kerja bersama di Kecamatan Sembakung.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah berkembang ke arah penerapan collaborative governance, yaitu keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam penyelesaian persoalan publik secara kolaboratif. Kolaborasi tersebut tercermin dari adanya pembagian peran, komunikasi yang intensif, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan publik dilaksanakan melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.

Secara teoritis, temuan penelitian ini sejalan dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik memerlukan keterlibatan berbagai aktor melalui kerja sama dan proses pengambilan keputusan secara bersama. Keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, serta unsur masyarakat di Kecamatan Sembakung menunjukkan bahwa koordinasi tidak hanya bertumpu pada hubungan birokratis, tetapi juga pada kemitraan antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, praktik koordinasi yang berlangsung telah mencerminkan karakteristik kolaborasi sebagaimana dijelaskan dalam teori tersebut.

c. Kompetensi Partisipan dalam Koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung melibatkan berbagai stakeholder sesuai dengan kapasitas, tugas, dan kewenangan masing-masing. Pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator wilayah, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum, Koramil mendukung pengamanan wilayah, sedangkan sektor kesehatan dan sektor pendidikan berkontribusi dalam pembinaan sosial

kemasyarakatan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah menjalankan fungsi yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung telah melibatkan berbagai bidang, meliputi aspek keamanan, kesehatan, pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan. Keterlibatan berbagai sektor tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menciptakan stabilitas wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi di Kecamatan Sembakung tidak lagi semata-mata berorientasi pada mekanisme birokrasi administratif, tetapi juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Keterlibatan berbagai unsur nonpemerintah memperkuat pelaksanaan koordinasi melalui pendekatan yang lebih partisipatif sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Praktik tersebut menunjukkan adanya kecenderungan koordinasi yang mengarah pada tata kelola yang lebih kolaboratif tanpa mengesampingkan fungsi dan kewenangan masing-masing institusi.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Prihartono dkk. (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian konflik sosial dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai stakeholder sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kesamaan tersebut terlihat pada pentingnya pembagian peran yang jelas dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada ditemukannya peran tokoh agama dan tokoh adat sebagai aktor yang tidak hanya berfungsi sebagai pendukung koordinasi, tetapi juga sebagai mediator sosial yang memperkuat efektivitas koordinasi lintas sektor pada wilayah kecamatan perbatasan.

d. Kesepakatan dan Komitmen dalam Koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilaksanakan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarstakeholder. Pemerintah kecamatan berperan sebagai koordinator dan mediator dalam penyelesaian konflik, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum, Koramil mendukung pengamanan wilayah, sedangkan tokoh masyarakat berperan dalam membangun pendekatan sosial kepada masyarakat. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder telah memahami fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pembagian tugas tersebut mencerminkan adanya kesepakatan dan komitmen bersama antarstakeholder dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi setiap pihak untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya tanpa mengabaikan pentingnya kerja sama lintas sektor. Dengan adanya komitmen bersama, pelaksanaan koordinasi dapat berlangsung secara lebih terarah dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang telah disepakati.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung tidak hanya bersifat struktural dan birokratis, tetapi juga didukung oleh komitmen sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Peran kedua unsur tersebut memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan persuasif, musyawarah, serta penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi tidak hanya bertumpu pada kewenangan formal, tetapi juga pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen koordinasi di Kecamatan Sembakung tidak hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga diperkuat oleh hubungan sosial yang dilandasi nilai kekeluargaan dan budaya musyawarah yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut mendorong terciptanya kepercayaan, saling menghormati, dan kesediaan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Temuan ini menjadi salah satu kebaruan penelitian karena

menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan perbatasan tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme kelembagaan, tetapi juga oleh modal sosial masyarakat yang memperkuat komitmen antarstakeholder.

e. Kontinuitas Perencanaan dalam Koordinasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui rapat koordinasi, patroli bersama, apel gabungan, pemantauan kondisi keamanan wilayah, serta evaluasi kegiatan secara berkala. Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas, bertukar informasi, serta memperkuat sinergi antarstakeholder dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah melalui mekanisme koordinasi yang terencana.

Kontinuitas koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung tidak hanya dilakukan ketika terjadi konflik atau gangguan keamanan, tetapi juga dilaksanakan melalui berbagai upaya pencegahan secara rutin. Pendekatan preventif tersebut memungkinkan setiap stakeholder mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini sehingga tindakan penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. Dengan demikian, koordinasi yang berkelanjutan berperan penting dalam menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib, dan kondusif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberlanjutan koordinasi lintas sektor dipengaruhi oleh komitmen para stakeholder serta keberadaan forum komunikasi yang dilaksanakan secara rutin. Forum koordinasi tersebut menjadi media untuk memperkuat hubungan antarlembaga, menyamakan persepsi, serta menyusun langkah bersama dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan koordinasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur organisasi, tetapi juga oleh konsistensi interaksi dan komitmen seluruh pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan lima indikator koordinasi menurut Putri, A. A. T., Mujahid, M., & Daga, R. (2026), yaitu komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan. Kelima indikator tersebut menunjukkan adanya sinergi antarstakeholder melalui komunikasi yang aktif, pembagian tugas yang jelas, keterlibatan berbagai unsur masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan operasional, seperti keterbatasan akses wilayah, jaringan komunikasi, serta ego sektoral antarinstansi yang memerlukan perhatian untuk meningkatkan kualitas koordinasi pada masa mendatang.

2. Manajemen Koordinasi Lintas Sektor dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Sembakung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung tidak hanya dilaksanakan melalui pendekatan administratif birokrasi, tetapi juga memadukan pendekatan sosial, budaya, dan keagamaan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah berkembang menjadi tata kelola kolaboratif berbasis partisipasi masyarakat.

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dilakukan secara bersama-sama melalui forum koordinasi lintas sektor sehingga setiap stakeholder memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi lapangan dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kesamaan persepsi yang dibangun sejak tahap perencanaan turut mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi pada tahap berikutnya.

Kegiatan pemetaan wilayah rawan dan identifikasi potensi konflik menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan bersama aparat keamanan telah menerapkan pendekatan preventif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pendekatan preventif tersebut memungkinkan para stakeholder mengidentifikasi potensi gangguan sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dengan demikian, proses perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai penyusunan program kerja, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko dalam menjaga stabilitas wilayah.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilakukan melalui pembagian tugas dan kewenangan antarstakeholder sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi setiap instansi untuk melaksanakan perannya secara terarah dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Kejelasan struktur pengorganisasian tersebut juga mempermudah proses koordinasi karena setiap stakeholder memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya.

Pemerintah kecamatan bertindak sebagai koordinator wilayah dan mediator dalam penyelesaian konflik sosial, kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengamanan, Koramil mendukung pengamanan wilayah serta deteksi dini terhadap potensi konflik, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi penegakan peraturan daerah. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya sinergi antarlembaga sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Kondisi tersebut mendukung pelaksanaan koordinasi yang lebih efektif dalam menangani berbagai persoalan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Sembakung.

Selain struktur formal pemerintahan, pengorganisasian koordinasi juga melibatkan unsur masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh adat, dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Keterlibatan unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian koordinasi di Kecamatan Sembakung tidak hanya bertumpu pada struktur birokrasi formal, tetapi juga didukung oleh struktur sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Peran tokoh masyarakat tersebut memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelaksanaan koordinasi menjadi lebih adaptif terhadap kondisi sosial setempat.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan pengorganisasian koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ego sektoral dan perbedaan persepsi antarinstansi dalam menangani kasus-kasus tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keterpaduan pelaksanaan tugas apabila tidak disertai dengan komunikasi dan penyamaan persepsi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antarlembaga melalui forum koordinasi yang lebih intensif, penyamaan pemahaman mengenai pembagian peran, serta peningkatan komitmen bersama agar efektivitas koordinasi lintas sektor dapat terus ditingkatkan.

c. *Actuating* (Penggerakan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggerakan koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung diwujudkan melalui pelaksanaan patroli gabungan, apel gabungan, pengamanan kegiatan masyarakat, penyuluhan sosial, pembinaan pelajar, serta penyelesaian konflik sosial secara kolaboratif. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari rencana koordinasi yang telah disusun bersama oleh para stakeholder. Melalui pelaksanaan kegiatan secara terpadu, setiap pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara aktif dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pelaksanaan patroli gabungan dan pengamanan kegiatan masyarakat menunjukkan adanya kerja sama yang nyata antarstakeholder dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan aparat keamanan, tetapi juga pemerintah kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, serta unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mencerminkan adanya sinergi dalam pelaksanaan koordinasi sehingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, sektor pendidikan juga berperan dalam penggerakan koordinasi melalui kegiatan pembinaan karakter peserta didik, penyuluhan bahaya narkoba, serta pengawasan lingkungan sekolah. Keterlibatan sektor pendidikan menunjukkan bahwa upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui pembentukan karakter dan peningkatan kesadaran generasi muda. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penggerakan koordinasi dilaksanakan secara multidimensional dengan melibatkan berbagai sektor yang memiliki kontribusi terhadap terciptanya stabilitas sosial masyarakat.

Temuan tersebut menjadi salah satu kebaruan penelitian karena menunjukkan bahwa efektivitas penggerakan koordinasi di wilayah Kecamatan Sembakung tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan ke dalam pelaksanaan koordinasi lintas sektor. Integrasi antara struktur birokrasi dan modal sosial masyarakat tersebut membentuk mekanisme koordinasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan. Kebaruan ini memperkaya kajian mengenai koordinasi lintas sektor dengan menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi penggerakan dipengaruhi oleh sinergi antara pendekatan kelembagaan dan pendekatan sosial kemasyarakatan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dalam manajemen koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung dilaksanakan melalui monitoring kondisi keamanan wilayah, evaluasi kegiatan rutin, laporan masyarakat, serta evaluasi terhadap hasil patroli dan pengamanan di lapangan. Berbagai mekanisme tersebut menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap kegiatan koordinasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Melalui proses pengawasan yang berkelanjutan, para stakeholder dapat mengidentifikasi permasalahan sekaligus melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi lintas sektor guna mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan serta berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi para stakeholder dalam menyusun langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan koordinasi pada kegiatan berikutnya. Dengan demikian, proses pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran untuk penyempurnaan pelaksanaan koordinasi secara berkelanjutan.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Djakit dkk. (2025) yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di masyarakat. Persamaan tersebut terlihat pada pentingnya evaluasi berkala sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan koordinasi antarlembaga. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan pada wilayah kecamatan perbatasan juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan informasi serta kondisi geografis wilayah yang memengaruhi proses monitoring di lapangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa manajemen koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah berjalan dengan cukup baik melalui penerapan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling secara terpadu. Keempat fungsi manajemen tersebut saling mendukung dalam membangun koordinasi yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta unsur masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala operasional, seperti keterbatasan akses wilayah, jaringan komunikasi, ego sektoral, serta keterbatasan sumber daya pendukung koordinasi yang memerlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas manajemen koordinasi lintas sektor di Kecamatan Sembakung tidak hanya dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen

secara formal, tetapi juga oleh modal sosial masyarakat yang tercermin melalui budaya kekeluargaan, musyawarah adat, pendekatan keagamaan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Modal sosial tersebut memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan, serta mempermudah pelaksanaan koordinasi dalam menghadapi berbagai persoalan ketenteraman dan ketertiban umum. Temuan ini menjadi kebaruan penelitian karena menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen koordinasi lintas sektor pada wilayah kecamatan perbatasan tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penerapan fungsi manajemen, tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan modal sosial masyarakat ke dalam mekanisme koordinasi antarstakeholder.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi antarpemangku kepentingan telah berlangsung melalui rapat koordinasi, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), patroli gabungan, dan media komunikasi digital. Kesadaran akan pentingnya koordinasi tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kompetensi partisipan terlihat dari pelaksanaan tugas sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, sedangkan kesepakatan dan komitmen diwujudkan melalui kerja sama lintas sektor dalam berbagai kegiatan pengamanan dan penyelesaian konflik. Kontinuitas perencanaan dilaksanakan melalui rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan patroli rutin yang lebih mengedepankan pendekatan preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan sejak dini. Namun demikian, pelaksanaan koordinasi masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis wilayah, keterbatasan jaringan komunikasi, dan ego sektoral antarinstansi.
2. Manajemen koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung telah dilaksanakan melalui penerapan fungsi *planning, organizing, actuating,* dan *controlling*. Perencanaan dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, identifikasi potensi konflik, dan rapat koordinasi; pengorganisasian dilaksanakan melalui pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi; penggerakan diwujudkan melalui patroli gabungan, pembinaan masyarakat, dan penyuluhan; sedangkan pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Penerapan keempat fungsi manajemen tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Sembakung lebih mengedepankan langkah-langkah preventif dibandingkan penanganan setelah terjadinya gangguan, sehingga koordinasi yang dilakukan bersifat antisipatif, berkelanjutan, dan partisipatif. Namun demikian, pelaksanaan manajemen koordinasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana pendukung, akses wilayah, dan sumber daya koordinasi.

5.Daftar Pustaka

Afdhal, dkk. 2023. *Pengantar ilmu manajemen: Organisasi dan perkembangannya*. Padang: CV Gita Lentera.

Afifuddin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

Agusmiati, A., Hamzah, N., & Daga, R. (2026). Peran Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Efektivitas Penyusunan, Monitoring Dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. *Bata Ilyas Educational Management Review*, *6*(2), 156-173.

Berg, E., Arif, M. A., Samad, A. 2024. Peran Inspektorat Daerah sebagai Konsultasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review* 6(2), 315–329.

Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. 2010. *The coordination of public sector organizations: Shifting patterns of public management*. New York: Palgrave Macmillan.

Dinanti, R. A. 2023. *Pelaksanaan fungsi koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di instansi Kecamatan Jambi Selatan* (Tesis). Universitas Jambi.

Dinda Zalvadan, A. R., & Yuza, A. F. 2024. Koordinasi pemerintah kecamatan dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(2), 226–236.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

Follett, M. P. 1997. *Dynamic Administration: The Collected Papers of Mary Parker Follett*. New York: Harper & Row.

Griffin, R. W. 2013. *Management: Principles and Practices* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.

Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Handayaningrat, S. 2002. *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.

Hasibuan, M. S. P. 2011. *Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah* (Edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.

Islamy, L. O. S. 2018. *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Katz, R. L. 1974. Skills of an effective administrator. *Harvard Business Review*, 52(5), 90–102.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat*. Jakarta: JDIH Kemendagri.

Koontz, H. and Weihrich, H. 2010. *Essentials of Management: An International Perspective.* McGraw Hill, New Delhi.

Malone, T. W., & Crowston, K. 1994. The interdisciplinary study of coordination. *ACM Computing Surveys*, 26(1), 87–119.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Moekijat. 2006. *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Mukmin, M. A. N., & Rauf, R. 2025. Koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2282–2294.

Moleong, L. J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

O'Toole, L. J., & Meier, K. J. 2002. Public management and organizational performance: The effect of managerial quality. *Journal of Policy Analysis and Management*, 21(4), 629–643.

Prihartono, D., Nugraha, M. Q., Noer, K. U., & Izzatusholekha. 2025. Implementasi kebijakan kewaspadaan dini masyarakat dalam penyelesaian konflik masyarakat di Kecamatan Jagakarsa. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 124–135.

Putri, A. A. T., Mujahid, M., & Daga, R. (2026). PENGARUH KOLABORASI DAN KINERJA TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGANAN

BENCANA DI DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Terapan*, *4*(1), 83-99.
Putra, F. M. 2020. *Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban daerah* (Skripsi). Universitas Brawijaya.

Quade, E. S. 1989. *Analysis for public decisions*. New York: North-Holland.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rivai, V. 2005. *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sentanu, I. G. E., dkk. 2023. *Kolaborasi dan analisis stakeholder: Teori, konsep, dan aplikasi*. Malang: UB Press.
Seran, R. A. Y. B. 2023. *Optimalisasi peran camat dalam mengoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka* (Skripsi). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Siagian, S. P. 2001. *Fungsi-fungsi manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
Soekanto, S. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. 2006. *Management* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sulastri, Lilis. 2014. *Manajemen: Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: La Goods Publishing.
Syafiie, I. K. 2011. *Manajemen pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Terry, G. R. 2010. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (Edisi Bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara.
Thomas, R., Daga, R., & Samad, A. (2024). Pengaruh Optimalisasi Penyuluhan Dan Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Narkoba Di Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, *3*(1), 96-104.
Wuladari, A. M. 2025. *Peranan kader siaga tramtib dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo* (Skripsi). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Wulandari, R. D. 2024. *Pengantar manajemen syariah*. Jakarta: Kencana.